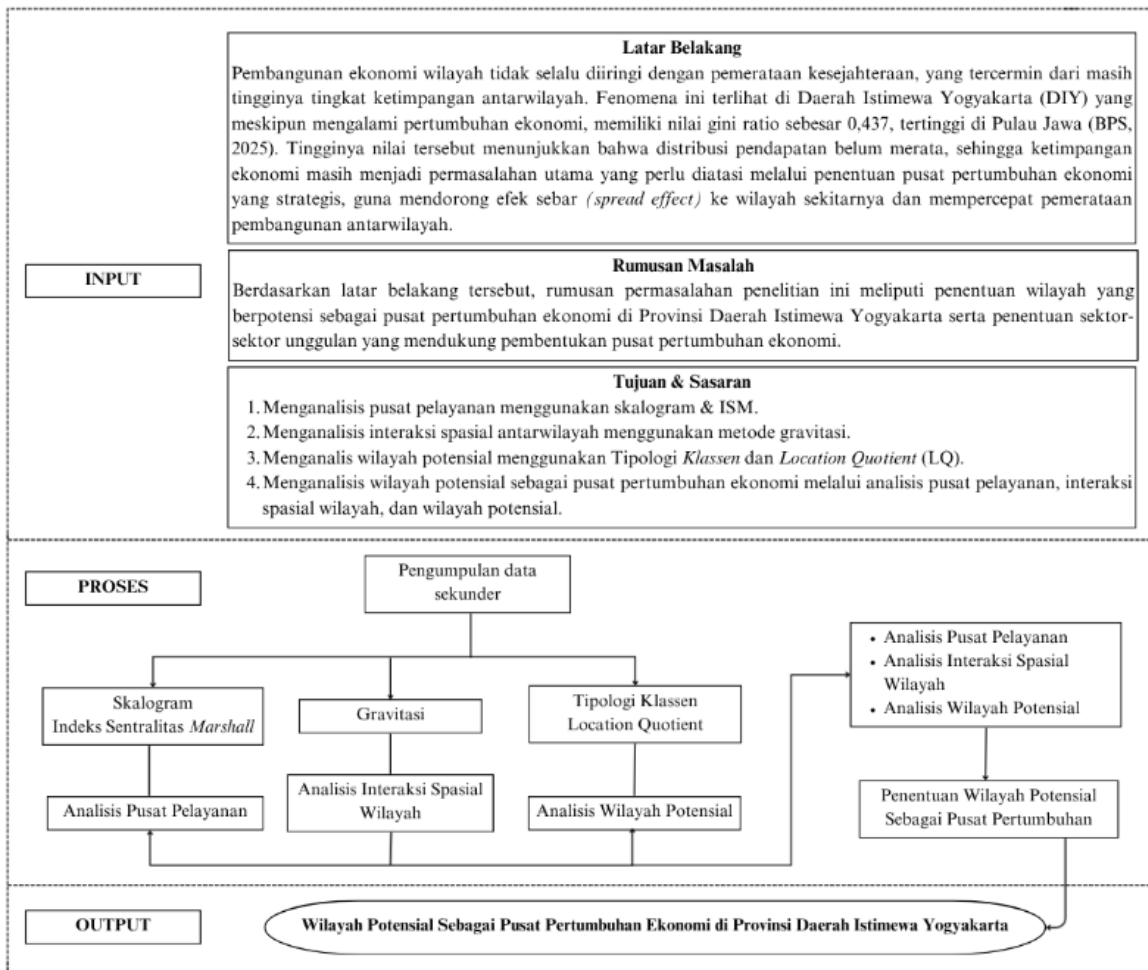


BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

Konsep perencanaan merupakan kerangka berpikir atau rancangan awal yang menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan secara sistematis. Berikut merupakan konsep perencanaan tugas akhir dengan judul “Penentuan Wilayah Potensial Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. Konsep Perencanaan

Diagram tersebut menunjukkan alur penelitian yang dimulai dari latar belakang berupa identifikasi masalah ketimpangan ekonomi di Provinsi DIY merupakan tertinggi ke 2 se Pulau Jawa. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, penelitian difokuskan pada penentuan pusat pertumbuhan ekonomi dengan sektor unggulan di masing-masing wilayah. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penerapan tiga analisis dengan lima metode yaitu metode skalogram, indeks sentralitas, gravitasi, tipologi *Klassen*, dan *Location Quotient* untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai fasilitas,

kekuatan interaksi, dan sektor basis tiap wilayah. Hasil akhirnya berupa wilayah potensial sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di DIY.

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau kajian literatur adalah suatu metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh para peneliti dan ahli sebelumnya terkait suatu topik tertentu. Kajian berfungsi sebagai sintesis atas berbagai sumber pada suatu topik untuk memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih terfokus (Kurniati dan Jailani, 2023). Berikut merupakan kajian literatur yang mendasari dan mendukung kasus penelitian.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses berkembangnya kegiatan ekonomi suatu wilayah yang tercermin dari peningkatan produksi barang dan jasa serta bertambahnya nilai output yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Menurut, Todaro & Smith, (2006) dalam (Wihastuti & Ma'ruf, 2008), pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sering digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB yang dihasilkan, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang berlangsung pada berbagai sektor ekonomi di wilayah tersebut. Namun demikian, dalam teori pembangunan regional terdapat konsep *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Penekanan pembangunan pada aspek pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi pemerataan dapat memicu ketimpangan wilayah. Fenomena ini terjadi karena perkembangan kegiatan ekonomi umumnya lebih terpusat pada wilayah yang memiliki kemudahan akses dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan modern mulai mengarah pada pada konsep *Retribution with Growth*, yaitu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperhatikan aspek pemerataan (Lestari dkk., 2021).

2.1.2 Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan memiliki cakupan yang lebih luas daripada kemiskinan, karena pengukuran ditujukan untuk melihat distribusi pendapatan dalam keseluruhan populasi, bukan hanya kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Khandker, 2010) dalam (Nadya & Syafri, 2019). Terdapat dua jenis ketimpangan yaitu ketimpangan antar kelompok masyarakat yang diukur menggunakan Gini Rasio dan melihat seberapa besar

bagian pendapatan nasional yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah. Ketimpangan akan dianggap memburuk apabila Gini Rasio meningkat. Ironisnya, saat bagian pendapatan yang diterima 40% masyarakat termiskin menurun, justru bagian pendapatan yang dinikmati 20% kelompok terkaya meningkat. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya *trickle up effect* yaitu kondisi ketika manfaat pembangunan lebih banyak mengalir ke kelompok kaya daripada ke kelompok miskin (Kuncoro, 1997) dalam (Nadya & Syafri, 2019). Menurut (Myrdal, 1957) dalam (Nadya & Syafri, 2019) menyebutkan bahwa ketimpangan wilayah dapat dijelaskan melalui dua jenis pengaruh, yaitu dampak sebar (*spread effect*) dan dampak balik (*backwash effect*). *Spread effect* merupakan dampak positif seperti, saat investasi atau aktivitas ekonomi dari wilayah maju menyebar ke daerah di sekitarnya sehingga memberikan manfaat. Sebaliknya, *backwash effect* merupakan pengaruh negatif seperti, tenaga kerja dan modal justru berpindah dari wilayah pinggiran ke wilayah inti, sehingga daerah pinggiran kehilangan sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan untuk berkembang. Ketimpangan regional di negara-negara berkembang terjadi karena *backwash effect* lebih kuat daripada *spread effect*. Ketika modal dan permintaan lebih tertarik ke wilayah maju, investasi semakin terkonsentrasi di wilayah maju, dan pendapatan wilayah tersebut meningkat lebih cepat. Akibatnya, wilayah pusat terus berkembang, sementara wilayah pinggiran semakin tertinggal karena minimnya modal yang masuk.

2.1.3 Wilayah *Hinterland*

Secara umum, wilayah pinggiran merujuk pada kawasan yang berada di luar pusat perkembangan wilayah dan berfungsi sebagai daerah *hinterland*. Identifikasi wilayah tersebut dapat dilakukan melalui karakteristik penggunaan lahannya, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dominasi aktivitas yang mencerminkan sifat perdesaan atau perkotaan (Ananda dkk., 2023). Kajian pembangunan wilayah, pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* menunjukkan hubungan yang bersifat interdependen. Hubungan tersebut tercermin dari adanya keterkaitan fungsi dan peran wilayah yang membentuk pola saling ketergantungan dalam mendukung aktivitas ekonomi maupun pelayanan. Peran ekonomi antara keduanya tercermin dari fungsi pusat pertumbuhan sebagai tempat distribusi kebutuhan pokok, pusat perdagangan, dan lokasi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan jaringan transportasi laut maupun udara yang turut mendukung aktivitas wilayah *hinterland* (Yarman, 2012). Menurut Yarman (2012), hubungan antara pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* bersifat saling bergantung, dimana pusat pertumbuhan menyediakan fasilitas, jasa, dan pasar, sedangkan wilayah *hinterland*

menyediakan sumber daya dan ruang pengembangan. Namun, wilayah *hinterland* cenderung memiliki konektivitas rendah dan akses ekonomi yang terbatas.

2.1.4 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menunjukkan total nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Perhitungan PDRB mencakup seluruh barang dan jasa yang diproduksi tanpa membedakan kepemilikan faktor produksinya, baik oleh penduduk setempat maupun pihak luar daerah. Sebagai salah satu indikator utama dalam analisis ekonomi regional, PDRB digunakan untuk menggambarkan kapasitas perekonomian suatu wilayah serta mengevaluasi capaian pembangunan secara makro. Perubahan nilai PDRB dari waktu ke waktu dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan nilai PDRB mengindikasikan berkembangnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kemampuan wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga mencerminkan kondisi perekonomian yang semakin baik (Romhadhoni dkk., 2019)

Berdasarkan BPS Sumatera Barat (2024) PDRB disusun dengan dua pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran. PDRB dapat dihitung melalui pendekatan produksi maupun pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan produksi, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, serta sektor jasa lainnya. Sementara itu, pendekatan pengeluaran menitikberatkan pada penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan, yang meliputi konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal, serta kegiatan ekspor dan impor. PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku mencerminkan nilai ekonomi sesuai harga yang berlaku pada tahun pengamatan, sedangkan PDRB harga konstan menggambarkan kondisi ekonomi riil karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga. Oleh sebab itu, pengukuran pertumbuhan ekonomi umumnya menggunakan PDRB harga konstan, sehingga perubahan yang terjadi lebih mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi dibandingkan perubahan akibat inflasi maupun deflasi. Dengan demikian, PDRB berfungsi sebagai indikator *output* ekonomi sekaligus alat untuk menganalisis struktur ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah (BPS Sumatera Barat, 2024).

2.1.5 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan atau *output* ekonomi per penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk, sehingga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dalam suatu daerah. Indikator ini sering digunakan dalam analisis ekonomi regional untuk membandingkan tingkat kemakmuran wilayah dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi. PDRB per kapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk selain menggambarkan kinerja ekonomi suatu wilayah. Secara umum, semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, indikator ini tidak selalu mencerminkan pemerataan pendapatan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara PDRB per kapita dengan IPM serta tingkat ketimpangan pembangunan wilayah (Ezkirianto & Alexandi, 2018). Perbedaan nilai PDRB per kapita wilayah menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti produktivitas tenaga kerja, tingkat investasi, konsumsi, dan struktur ekonomi daerah. Hasil penelitian terbaru mengindikasikan bahwa besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi makro, di antaranya pengeluaran konsumsi rumah tangga, penanaman modal (investasi), serta kegiatan ekspor dan impor yang berlangsung di suatu wilayah (Jayanti dkk., 2025).

2.1.6 Pengertian Fasilitas

Fasilitas umum merupakan berbagai bentuk sarana dan prasarana publik yang berfungsi untuk menunjang penyelenggaraan aktivitas masyarakat. Keberadaannya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk sekaligus mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan fisik suatu wilayah. Konteks perkotaan maupun permukiman, fasilitas umum mencakup berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan fasilitas sosial lainnya yang berperan sebagai penunjang aktivitas masyarakat. Keberadaan fasilitas umum yang memadai menjadi prasyarat utama dalam mendukung fungsi sosial dan ekonomi suatu wilayah, dan menentukan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Dwison dkk., 2026).

Fasilitas umum yang penting bagi masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan, perekonomian, dan transportasi. Pemerataan fasilitas pendidikan menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akses yang merata memungkinkan masyarakat memperoleh layanan pendidikan secara lebih adil. Di sisi lain,

distribusi fasilitas pendidikan turut memengaruhi pola pergerakan penduduk, dimana kedekatan lokasi sering menjadi pertimbangan dalam memilih sarana pendidikan karena berkaitan dengan efisiensi waktu dan biaya (Sasmitasari dkk., 2025). Fasilitas kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan secara luas dan merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wardiah dkk., 2023). Fasilitas peribadatan tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan interaksi masyarakat. Fasilitas perekonomian seperti pasar berperan sebagai sarana distribusi barang dan jasa, mendorong aktivitas ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wunarlan, 2023). Sementara itu, fasilitas transportasi menjadi penghubung antar fasilitas umum, memudahkan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat secara efisien (Putri, 2022).

2.1.7 Teknik Sampling

Sampling adalah tahap penting dalam penelitian kuantitatif, terutama ketika jumlah populasi terlalu besar untuk diteliti seluruhnya. Penggunaan sampel dilakukan ketika pengamatan terhadap seluruh populasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sampel merupakan sebagian elemen dari populasi yang dipilih melalui metode tertentu sehingga dapat mencerminkan karakteristik populasi dan menghasilkan data yang representatif. Penggunaan sampel juga membantu mengatasi keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga tanpa mengurangi kualitas penelitian (Riswanto dkk., 2024).

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *probability sampling*, dimana setiap unit fasilitas umum yang menjadi bagian dari populasi diberikan kesempatan yang setara untuk masuk ke dalam sampel penelitian. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi secara lebih objektif (Wahyudi dkk, 2023). Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan sampel yang representatif terhadap kondisi seluruh fasilitas umum dalam suatu wilayah. Ukuran sampel ditetapkan melalui rumus Slovin. Metode ini digunakan pada kondisi dimana total populasi telah diketahui, sedangkan data mengenai karakteristik populasi belum tersedia secara lengkap. Rumus ini mempertimbangkan tingkat kesalahan tertentu sehingga ukuran sampel yang diperoleh tetap akurat dan efisien untuk dianalisis. Adapun rumus Slovin menurut Wahyudi dkk., (2023) sebagai berikut:

$$s = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

- s = Jumlah Sampel
N = Besar Fasum
e = *error* (10%)

Berdasarkan rumus Slovin, jumlah sampel ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang ditetapkan peneliti. Tingkat kesalahan yang digunakan dalam perhitungan sampel berbanding terbalik dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. Semakin kecil nilai kesalahan yang ditetapkan, semakin besar jumlah sampel yang harus diambil untuk meningkatkan ketelitian hasil penelitian. Rumus Slovin diterapkan karena ukuran populasi fasilitas umum telah diketahui, sehingga dapat diperoleh sampel yang mewakili kondisi wilayah penelitian secara memadai.

2.1.8 Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan merupakan wilayah yang berkembang sebagai titik pertumbuhan akibat adanya dorongan aktivitas pembangunan. Dorongan tersebut dapat mendorong munculnya berbagai kegiatan lain di sekitarnya, sehingga aktivitas-aktivitas tersebut cenderung terkonsentrasi pada lokasi tertentu dan membentuk suatu kawasan dengan fungsi pelayanan tertentu. Kawasan inilah yang kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan atau pusat pelayanan (Nugraha dkk., 2024). Pusat pelayanan dianalisis menggunakan metode skalogram dan indeks sentralitas *Marshall*. Metode skalogram digunakan untuk menganalisis kelengkapan serta variasi fasilitas yang tersedia pada suatu wilayah, sedangkan indeks sentralitas *Marshall* digunakan untuk mengukur tingkat kepusatan wilayah berdasarkan jumlah dan bobot fasilitas yang dimiliki. Kedua metode tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan hierarki pusat pelayanan pada masing-masing wilayah.

2.1.9 Interaksi Spasial Wilayah

Interaksi spasial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi wilayah akibat adanya perpindahan penduduk, barang, jasa, maupun informasi. Hubungan tersebut terbentuk karena setiap wilayah memiliki karakteristik, sumber daya, dan fungsi yang berbeda sehingga saling melengkapi satu sama lain. Interaksi spasial dapat diwujudkan melalui aktivitas perdagangan, mobilitas penduduk, komunikasi, serta berbagai bentuk pertukaran lainnya. Besarnya intensitas interaksi sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, terutama jarak dan tingkat aksesibilitas. Semakin dekat jarak wilayah dan semakin baik sarana transportasi yang tersedia, maka semakin tinggi pula peluang terjadinya interaksi wilayah tersebut (Hidayah dkk., 2023). Interaksi spasial dikaji menggunakan metode

gravitasi, yaitu metode untuk mengukur kekuatan hubungan wilayah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan jarak wilayah.

2.1.10 Wilayah Potensial

Penentuan wilayah potensial dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas ekonomi daerah serta mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki keunggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan Tipologi *Klassen* dan *Location Quotient* (LQ). Tipologi *Klassen* digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing daerah. Sementara itu, analisis LQ diterapkan untuk mengetahui sektor basis yang menjadi keunggulan ekonomi suatu wilayah. Nilai LQ yang melebihi satu mengindikasikan bahwa sektor tersebut memiliki spesialisasi dan daya saing yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah acuan, sehingga berpotensi menjadi sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kombinasi kedua metode tersebut, penentuan wilayah potensial tidak hanya didasarkan pada kondisi pertumbuhan ekonominya, tetapi juga pada keberadaan sektor unggulan yang dapat mendorong peningkatan PDRB dan mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Rajab, 2025).

2.1.11 Teori *Growth Pole*

Menurut Perroux (1970) dalam (Rusdiarti & Fafurida, 2016), pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada lokasi tertentu yang disebut pusat pertumbuhan (*growth pole*). Pusat pertumbuhan terbentuk oleh keberadaan sektor atau industri unggulan yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*) yang kuat sehingga mampu mendorong perkembangan sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan yang terjadi pada wilayah pusat kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya melalui berbagai hubungan ekonomi, sedangkan wilayah yang belum berkembang tetapi memiliki potensi dapat mengalami percepatan pembangunan akibat pengaruh dari wilayah yang lebih maju. Konsep *growth pole* menjadi dasar dalam penentuan pusat pertumbuhan dan sub-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah melalui mekanisme *spread effect* atau dampak sebar. *Spread effect* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat dapat memberikan pengaruh positif kepada wilayah sekitarnya melalui penyebaran investasi, aktivitas ekonomi, infrastruktur, pelayanan, dan kesempatan kerja.